

Tantangan Etika Pembangunan Menjelang Indonesia Tahun 2000*

Franz Magnis-SUSENO S.J.

Pengantar

Tema yang diminta untuk dibahas sebenarnya berbunyi: Dasar-dasar Etika, Moral dan Spiritualitas Pembangunan Indonesia." Apabila ditanyakan apa yang kiranya dimaksud dengan tema itu, kita akan bertolak dari tiga kata kunci: "Etika," "moral," dan "spiritualitas." Dengan etika dimaksud "teori tentang moralitas." "Moral," atau "moralitas," adalah keseluruhan nilai dan norma yang menentukan kebaikan atau kualitas manusia sebagai manusia. Sedangkan "spiritualitas" barangkali dapat diartikan sebagai "keterarahan batin."

Akan tetapi, kalau tiga faham itu dihubungkan dengan pembangunan, kita menghadapi dua masalah. Pertama, pembangunan adalah peristiwa sosial dan politik. Dalam bidang itu spiritualitas dan moralitas

pribadi hanyalah sekedar prasyarat. Yang menentukan adalah etika yang terwujud dalam cita-cita dan tujuan pembangunan sendiri serta dalam tatanan hukum yang mendasarinya. Yang perlu kita persoalkan bukan moralitas masing-masing partisipan pembangunan, melainkan cita-cita normatif keseluruhan pembangunan.

Oleh karena itu akan diubah sedikit judul pembahasan menjadi "Tantangan Etika Pembangunan Menjelang Indonesia Tahun 2000."

Kedua, etika pada hakekatnya adalah ilmu yang menanggapi. Etika bukan yang pertama. Yang pertama adalah moralitas, sikap-sikap, cita-cita, pandangan-pandangan normatif yang hidup dalam masyarakat. Etika menanggapi sikap-sikap, cita-cita, pandangan-pandangan itu. Tak ada gunanya membangun sebuah etika apriori untuk kemudian menempatkannya dari luar sebagai kendala normatif terhadap pembangunan. Dan karena itu juga tidak akan dicoba untuk meletakkan lebih dulu sebuah dasar etika pada umumnya, lalu mendeduksikan sesua-

*Prasaran pada Temu Ilmiah 1989 PP-PMKRI tentang "Prospek Integrasi Nasional dalam Perspektif Pembangunan Indonesia," Jakarta, 10 Juni 1989.

tu untuk bidang politik dan akhirnya merumuskan, andaikata itu mungkin, sebuah daftar tuntutan etis yang dari luar dihadapkan pada pembangunan Indonesia.

Dalam hal ini ditempuh jalan yang kebalikan. Yaitu dimulai dari cita-cita dan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi motivasi pergerakan nasional Indonesia, dari keyakinan-keyakinan etis yang menurut para pejuang kemerdekaan sendiri harus terwujud dalam Indonesia Merdeka.

Selanjutnya bagian kedua akan mencoba mengidentifikasi beberapa pengalaman dan tantangan kunci bangsa Indonesia selama hampir 45 tahun merdeka. Lalu atas dasar ini bagian ketiga mau mencoba merumuskan tantangan etika yang harus dihadapi pembangunan kita menjelang Indonesia tahun 2000.

Cita-cita Dasar Indonesia Merdeka

Bagian pertama ini berdasarkan sebuah pengandaian. Yaitu pengandaian bahwa perjuangan demi Indonesia yang merdeka dijiwai bukan sekedar oleh kepentingan putra dan putri Indonesia sebagai orang Indonesia, melainkan oleh cita-cita universal kemanusiaan. Mereka tidak semata-mata berjuang demi kepentingan kelompok mereka, mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan cita-cita dan keyakinan-keyakinan yang mereka akui berlaku di seluruh dunia. Mereka berjuang bukan hanya atas nama orang Indonesia, melainkan atas nama manusia. Mereka berjuang bukan sekedar atas dasar sebuah kepentingan, melainkan atas dasar sebuah keyakinan yang berstatus etis.

Bagian pertama ini ingin mengidentifikasi tujuh cita-cita dan keyakinan yang

tampak jelas sekali mendasari perjuangan para tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini saya sadar bahwa saya bukan seorang ahli sejarah, apalagi ahli sejarah Indonesia. Tetapi seorang awam pun dapat menemukan cita-cita dan keyakinan-keyakinan etis itu dalam apa yang dikatakan dan ditulis oleh tokoh-tokoh itu. Di sini salah satu sumber yang sangat penting adalah Undang-Undang Dasar 1945, lebih-lebih pembukaan dan penjelasannya.

Tujuh keyakinan itu adalah [tanpa mengecualikan adanya cita-cita lain lagi]: Kemerdekaan, kesatuan bangsa, negara nasional, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, negara hukum dan kesetiakawanan internasional. Terpaksa saya membatasi diri pada beberapa catatan saja.

Kemerdekaan

”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” merupakan kalimat pembuka UUD 1945 yang sangat mengesankan. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan serta Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar keyakinan bahwa segenap bangsa berhak atas kemerdekaannya, bahwa ”penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perike-manusiaan dan perikeadilan.”

Jadi dalam negara kita cita-cita kemerdekaan tertanam dalam-dalam. Pertama-tama keyakinan akan hak setiap bangsa atas kemerdekaannya. Akan tetapi karena bangsa hanyalah nyata dalam manusia-manusia yang mewujudkannya, maka cita-cita kemerdekaan sekaligus memuat pengakuan terhadap sebuah ethos kebebasan manusia, kebebasan setiap manusia, dan bagi kita pertama-tama kebebasan manusia Indonesia.

Kesatuan Bangsa

Untuk memahami bobot keyakinan akan kesatuan bangsa Indonesia, kita dapat melihat pada keadaan di Hindia Belanda, di wilayah Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Wilayah Hindia Belanda dihuni bukan oleh sebuah bangsa yang secara etnis homogen seperti bangsa Korea atau bangsa Norwegia, melainkan oleh ratusan suku dan kebudayaan, dengan lebih dari 200 bahasa, dengan pelbagai keyakinan, agama dan kepercayaan, dan terpencar-pencar atas lebih dari 3.000 pulau.

Bahwa kemajemukan itu mau menjadi satu negara dan berkembang semakin menjadi satu bangsa -- tidak percuma Presiden Soekarno melihat *nation building* sebagai tugas bangsa Indonesia yang paling mendasar -- samasekali bukan barang tentu. Kesadaran akan kesatuan itu sendiri merupakan sebuah peristiwa historis. Peristiwa historis itu dapat kita tempatkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyepakati cita-cita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Orang dapat berkata: Kesatuan itu bukan nilai etis, melainkan sebuah keputusan faktual belaka. Akan tetapi hal itu tidak seluruhnya betul. Mengapa kesatuan seluruh wilayah Hindia Belanda menjadi keyakinan dasar para tokoh pergerakan nasional? Karena para penduduk wilayah itu memang dipersatukan oleh ikatan sejarah bersama yang sebagian merupakan sejarah penderitaan, keterasingan dan penghinaan bersama di bawah pemerintah penjajah. Pada latar belakang itu sumpah kesatuan itu lebih daripada sebuah fakta. Sumpah itu sebuah tekad untuk mendahulukan kebersamaan terhadap egoisme kelompok, untuk bersama-sama menyumbangkan serta mengurbankan sesuatu demi kebersatuan yang dengan demi-

kian akan memberikan arti dan makna pada sejarah penderitaan bersama itu.

Negara Nasional

Bagi saya di sini proses perumusan Pancasila sampai dengan perumusan definitif dalam UUD 1945 adalah sangat menarik. Kita semua tahu bahwa menjelang pertengahan tahun 1945, waktu kekalahan Jepang semakin menjadi kemungkinan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hampir kandas dalam mempersiapkan kemerdekaan. Sebabnya pertentangan tajam antara kelompok yang ingin mendasarkan negara baru itu atas dasar keindonesiaan atau nasionalisme, dan kelompok yang ingin mendasarkannya pada agama Islam tampaknya tak dapat dijumpai. Untuk mengatasi pertentangan itu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPK mengemukakan apa yang disebutnya *Pancasila*. Dalam Pancasila itu aspirasi baik golongan nasionalis maupun golongan Islam mau ditampung. Pidato itu disambut dengan hangat oleh para hadirin. Akan tetapi dalam pengembangan selanjutnya, oleh sebuah Panitia Kecil Pancasila rumusan Soekarno mengalami perubahan yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai berikut: "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Dalam bentuk ini Pancasila masuk ke dalam rancangan UUD-RI. Pada malam menjelang tanggal 18 Agustus Mohammad Hatta menerima pesan bahwa Indonesia Timur tidak mau masuk ke dalam kesatuan RI kecuali tujuh kata itu dihapus. Alasannya bahwa dengan tujuh kata itu salah satu agama diberi kedudukan yang istimewa pada bagian ter-

penting UUD Republik. Pagi-pagi tanggal 18, Hatta memanggil empat tokoh Islamis dan membicarakan masalah itu. Atas kesepakatan mereka Hatta kemudian mengusulkan pencoretan tujuh kata itu kepada Sidang Pleno PPKI yang mengikuti usul itu. Maka diterimalah UUD (1945) dengan perumusan Pancasila yang kita kenal sejak itu.

Apa makna peristiwa ini? Pertama bahwa nilai persatuan nasional bangsa Indonesia rupa-rupanya bagi semua anggota PPKI yang kebanyakan beragama Islam, termasuk mereka yang Islamis, merupakan nilai dan pesan bangsa yang harus diunggulkan terhadap segala keinginan khusus kelompoknya masing-masing.

Kedua, Republik Indonesia terbangun atas dasar kenasionalan Indonesia dan bukan atas dasar salah satu agama (meskipun yang terbanyak penganutnya), suku, daerah, kebudayaan atau ideologi tertentu. Dengan demikian, dan hanya dengan demikian, terjamin bahwa Republik Indonesia kita ini menjadi Republik semua warga bangsa, jadi bahwa semua dapat mengidentifikasi diri dengannya.

Keadilan Sosial

Dalam arti tertentu (dalam arti pengisian kemerdekaan) keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan keyakinan paling dasar semua tokoh kemerdekaan. Dalam Pembukaan UUD 1945 istilah keadilan sosial muncul dua kali. Dalam pokok-pokok pikiran keadilan sosial langsung disebut sesudah persatuan.

Bagi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan kita penjajahan selalu juga merupakan sistem penghisapan bangsa Indonesia oleh

bangsa asing. Penghisapan itu menimbulkan kemiskinan. Karena penghisapan itu dihubungkan dengan kapitalisme, maka tokoh-tokoh pergerakan nasional semua antikapitalistik. Antikapitalisme itulah yang menjadi keyakinan mereka. Tentang alternatif nyata terhadap sistem kapitalisme, mereka dengan sendirinya masih kabur. "Sosialisme" dan "Marxisme" difahami lebih sebagai janji pembebasan dari penghisapan manusia atas manusia daripada dari isi empiris operasional atau dari pengalaman nyata dengan sistem-sistem yang mendasarkan diri pada ideologi-ideologi itu. Mereka belum membedakan dengan tajam antara sosial dan sosialis, mereka belum sepenuhnya sadar akan kejahatan sistem komunisme. Tetapi mereka sedikit pun tidak kabur dalam keterlibatan pada pengangkatan seluruh masyarakat dari kemiskinan dan keterlantaran. Keprihatinan sosial merupakan salah satu pesan etis terkuat yang tertanam dalam UUD 1945.

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah pokok pikiran ketiga dalam Pembukaan UUD 1945. Keyakinan akan kedaulatan rakyat erat berhubungan dengan keyakinan akan kemerdekaan. Kemerdekaan hanya dapat menjadi tuntutan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Tuntutan kedaulatan rakyat berdasarkan pengalaman bahwa di bawah penjajahan rakyat Indonesia dianggap obyek saja. Obyek penataan, obyek penghisapan, obyek penindasan, kadang-kadang obyek belas kasihan, juga obyek penelitian, tetapi selalu obyek. Mereka tidak dihormati sebagai subyek, tidak dianggap perlu didengar, tidak dianggap mempunyai sesuatu yang bernilai yang dapat dipelajari dari mereka.

Maka kedaulatan rakyat menjadi keyakinan para elite perjuangan kemerdekaan. "Rakyat" bagi mereka merupakan faham yang hampir-hampir ada mistiknya. Dalam perang kemerdekaan mereka merasakan kesetiaan, keluhuran budi, keluwesan hati dan keuletan rakyat.

Akan tetapi, sekitar kedaulatan rakyat itu terjadi juga sebuah perdebatan. Soekarno berpendapat bahwa sudah cukuplah kalau kedaulatan rakyat dijamin sebagai keseluruhan. Sebaliknya Hatta menuntut agar kedaulatan rakyat dirinci dalam hak-hak demokratis masing-masing warga negara.

Tampaknya posisi yang satu kurang memperhatikan dua hal. Pertama bahwa bicara tentang rakyat dan kedaulatannya dapat menjadi kosong, bahkan ideologis, kalau tidak diterjemahkan ke dalam realitas masing-masing orang yang membentuk rakyat itu.

Kedua, tidak dilihat kemungkinan bahwa rakyat harus juga dilindungi terhadap pemerintahnya sendiri. Seakan-akan hanya penjajah yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Bahwa segenap kekuasaan dalam tangan siapa pun condong untuk melampaui batasnya tidak dilihat.

Akhirnya pandangan Hatta yang diterima. Dengan demikian kita sekarang mempunyai Pasal 28 UUD 1945 yang meskipun pendek, namun penuh makna: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Empat *freedom* itu: *freedom of association*, *freedom of assembly*, *freedom of speech* dan *freedom of the press* dengan demikian dipisahkan untuk dijamin dalam UUD negara kita.

Negara Hukum

Berhadapan dengan kesewenangan penjajahan Belanda dan kekejaman penguasaan Jepang para penyusun UUD 1945 membuat sejelas-jelasnya bahwa negara kita harus merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*) dan pemerintahnya harus berdasarkan sistem konstitusi. Mereka menolak kekuasaan yang tidak terbatas.

Maka negara kita dalam segala tindak-tanduk selalu harus berdasarkan hukum, bukan sembarang hukum, melainkan hukum yang adil dan benar, yang berdasarkan UUD dan mewujudkan cita-cita kebatinan bangsa sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesetiakawanan antar Bangsa

Sebagai unsur etis ketujuh saya mau menyebutkan kesetiakawanan antar bangsa. Istilah itu sendiri tidak muncul dalam teks-teks dulu. Akan tetapi apabila kita membaca Pembukaan UUD 1945 maka menjadi jelas bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa. Wawasan UUD 1945 adalah wawasan perikemanusiaan dan perikeadilan. Indonesia merasa dirinya terikat oleh kewajiban untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan."

Dengan demikian Indonesia menolak nasionalisme yang chauvinistik. Begitu pula para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno, tidak pernah memberikan angin kepada cita-cita sebuah Indonesia Raya dalam arti yang merangkum seluruh Pulau Kalimantan dan barangkali juga Semenanjung Malaya. Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah

jajahan Portugis dan jajahan Australia yang di seberang batas-batas negara kita.

Beberapa Pengalaman Bangsa Indonesia Selama 44 Tahun Perjalanan Sejarah

Tidaklah mungkin membahas semua tantangan terhadap cita-cita etis itu selama 44 tahun perjalanan bangsa Indonesia sesudahnya. Saya mau membatasi diri pada lima tantangan yang semuanya mempunyai dampak besar pada perwujudan wajah Indonesia yang kita kenal sekarang.

Tantangan Ideologis

Republik Indonesia ditantang secara ideologis dari dua pihak. Dari pihak ekstrem Islam, dan dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sayap ekstrem Islam menganggap negara Pancasila sebagai kafir. Maka mereka tidak mengakui Republik. 1950, Kartosuwirjo memproklamasikan "negara Islam" dengan nama Darul Islam di Malabong (sebelah Timur Bandung). Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan menyatakan diri bergabung. DI baru habis ditumpas pada pertengahan tahun 1960-an.

Sedangkan PKI sejak semula mencari kekuasaan eksklusif bagi dirinya sendiri untuk mendirikan "demokrasi rakyat" sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme yang mereka anut. Dua kali mereka mencoba merebut kekuasaan, 1948 dalam pemberontakan Madiun dan 17 tahun kemudian melalui Gerakan 30 September yang mengadakan percobaan *coup d'état* pada tanggal 1 Oktober 1965.

Pengalaman itu membuat bangsa Indonesia waspada terhadap kemungkinan pengrongrongan oleh pihak-pihak yang tidak merasa terikat pada cita-cita dasar kenegaraan kita.

Tantangan Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Limabelas tahun pertama Republik ditandai oleh pelbagai keresahan dan bahkan pemberontakan yang bersifat kedaerahan, juga pribadi. Pengalaman-pengalaman itu menunjukkan bahwa pemantapan negara kita antara lain tergantung dari kemampuannya untuk mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain dengan adil dan wajar.

Hancurnya Populisme dan Kepemimpinan Ideologis

Pengalaman ketiga adalah pengalaman bahwa populisme dan sloganisme sebagaimana menjadi salah satu gejala demokrasi terpimpin tidak dapat memecahkan masalah-masalah bangsa yang sebenarnya. Slogan-slogan hebat seperti Manipol-Usdek, "revolusi belum selesai" dan Nasakom tidak dapat mencegah polarisasi yang semakin tajam antara pelbagai kekuatan ideologis di negara kita, sedangkan prasarana-prasarana ekonomis seperti jalan, kereta api, irigasi, semakin hancur. Nilai Rupiah semakin merosot, inflasi merajalela dan rakyat, terutama di pedesaan, sungguh-sungguh menderita kelaparan.

Pengalaman kegagalan pemerintahan sloganistik populis menjadi dasar keyakinan mendalam seluruh masyarakat tahun

1960-an bahwa yang kita perlukan adalah pembangunan yang nyata. Orde Baru bertekad melaksanakan panggilan itu.

Layunya Para Politisi Sipil

Dinamika perjuangan kemerdekaan dan sejarah Indonesia Merdeka sejak semula menempatkan Angkatan Bersenjata Republik ke dalam posisi di mana mereka tidak hanya harus membela nusa dan bangsa terhadap penjajah dan lawan dari luar, melainkan memikul tanggungjawab terhadap arah perjalanan Republik. Itulah yang kemudian disebut sebagai dwifungsi ABRI. G-30-S dan ekornya hanya membulatkan perkembangan itu. ABRI dipanggil berdiri di tengah-tengah panggung politik negara sebagai sokoguru penyelamatan Pancasila. Kenyataan itu sampai sekarang menjadi ciri khas dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Paralel dengan itu kita menyaksikan kemerosotan mutu kepemimpinan sipil. Partai-partai politik yang, meskipun dengan segala macam kekurangan, pernah betul-betul mengartikulasikan rakyat, sudah sejak Demokrasi Terpimpin semakin kehilangan kredibilitas mereka dan sampai sekarang belum berhasil untuk berbobot kembali. Dapat dipertanyakan apakah kita untuk selamanya dapat membiarkan potensi-potensi masyarakat bukan militer tidak sepenuhnya terpakai dalam proses rekrutiring kader-kader pemimpin bangsa.

Sosok Indonesia Modern

Pengalaman kelima bangsa Indonesia selama 44 tahun sejarahnya adalah munculnya sosok Indonesia modern. Meskipun kita masih cukup jauh dari keadaan sebuah negara

modern, tetapi sosoknya mulai kelihatan. Dan sosok itu lain samasekali daripada Indonesia yang dikenal para pendiri Republik kita.

Jelas sekali bahwa modernisasi merupakan salah satu tantangan terpenting bagi bangsa Indonesia.

Tantangan Etis Menjelang Tahun 2000

Sesudah kita melihat cita-cita etis kemerdekaan dan pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia selama 44 tahun perjalanan tinggal pertanyaan: Tantangan etis apa yang dihadapi bangsa Indonesia dalam usaha untuk membangun sarana-sarana kehidupan bersama yang lebih manusiawi menjelang tahun 2000?

Kemerdekaan Republik Indonesia sejak pembulatan pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya (pengakuan mana dapat ditempatkan pada tanggal 27 Desember 1949) tidak dipersoalkan lagi. Tinggal enam tantangan. Tentu tantangan itu lain daripada 44 tahun lalu. Bobot, arah dan prioritas berubah. Dan perlu ditambah satu tantangan baru. Di sini akan dibahas dalam urutan berikut: Keadilan sosial, perealisasi-an negara hukum, sosok demokrasi Indonesia, kesatuan dalam keanekaan, Pancasila, kesetiakawanan antar bangsa dan lingkungan hidup.

Keadilan Sosial

Perwujudan keadilan sosial tetap merupakan tantangan bagi Indonesia tahun 1990-an. Meskipun keadilan sosial menjadi keyakinan mendalam para pendiri Republik,

perwujudannya tetap perlu diusahakan. Revolusi fisik, masa demokrasi parlementer dan "demokrasi terpimpin" tidak berhasil menangani tantangan itu. Baru Orde Barulah yang sesudah meletakkan dasar pembangunan ekonomis sebagai prasyarat segala pembangunan mulai betul-betul menyadari tantangannya. Tetapi tantangan tetap masih ada.

Terlihat tiga unsur paling mendesak dalam tantangan keadilan sosial yang perlu dihadapi dalam 10 tahun mendatang:

1. Masalah kemiskinan absolut. Masih tetap lebih dari 20% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, menurut perhitungan mana pun.
2. Keadaan orang-orang di pedesaan, terutama mereka yang sekarang hidup dari pertanian serta kaum nelayan, sebagai keseluruhan masih banyak ditandai kemiskinan. Perlu diambil tindakan-tindakan struktural yang dapat menggerakkan suatu perkembangan yang terus-menerus mengangkat keadaan rakyat pedesaan.
3. Salah satu gejala terburuk selama 20 tahun terakhir adalah terbentuknya sebuah golongan kecil yang kekayaan dan kemewahan kehidupannya berada di luar segala proporsi kalau dibandingkan dengan sisa 95% masyarakat lainnya. Adanya golongan adi-kaya dan adi-mewah itu sudah, dan semakin akan, menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga masyarakat sederhana menjadi buta terhadap kemajuan-kemajuan yang sebenarnya sudah mereka nikmati juga berkat pembangunan, serta dapat menggerogoti *credibility* Pancasila sebagai landasan pembangunan kalau ada menghasilkan suatu perbedaan yang begitu mencolok dalam mata rakyat itu.

Kalau tantangan itu tidak kita atasi, kita tidak hanya lalai terhadap salah satu panggilan etis paling fundamental kemerdekaan kita. Melainkan kita juga betul-betul membahayakan stabilitas nasional. Pemenuhan kebutuhan dasar dan perasaan perlakuan adil merupakan prasyarat kemandirian dan ketenangan masyarakat.

Negara Hukum

Dalam 10 tahun mendatang usaha untuk mewujudkan negara kita menjadi negara hukum betul-betul harus berhasil. Artinya, kita lantas harus memiliki hukum yang adil, yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, yang bebas dari sisa-sisa penindasan kolonialisme yang efektif, artinya setiap warga masyarakat dapat mendasarkan diri padanya. Pemerintahan negara kita dapat diandalkan selalu taat pada hukum dan dikontrol oleh hukum. Hakim betul-betul bebas untuk menjatuhkan putusan semata-mata menurut hukum yang berlaku dan menurut keadilan. Seluruh masyarakat, tanpa kecuali, harus dapat mengandalkan efektivitas hukum yang berlaku. Segenap penduduk Indonesia menikmati perlindungan hukum sepenuhnya dan selalu diperlakukan sesuai dengan hukum. Terwujudnya negara hukum adalah dasar keberadaan kehidupan kenegaraan.

Sosok Demokrasi Indonesia

Perwujudan nyata demokrasi Pancasila dalam arti: Demokrasi betul-betul yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan merealisasikan UUD 1945 secara murni dan konsekuen perlu diteruskan. Tak mungkin kita memecahkan tantangan pembangunan ke-

cuali seluruh masyarakat terlibat di dalamnya. Partisipasi ini hanya mungkin apabila masyarakat betul-betul ikut dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut mereka sendiri, di semua tingkat kehidupan nasional.

Perlu direnungkan kembali bagaimana wujud paling optimal peranan dan tanggungjawab Angkatan Bersenjata kita dalam alam demokrasi Pancasila. Peranan itu merupakan hasil sejarah perjuangan bangsa dan tetap kita butuhkan. Tetapi bagaimana pola tugas yang hakiki itu? Apakah di masa mendatang harus selalu *high profile*? Mungkinkah peranan yang juga *low profile*, yang dalam keadaan biasa, tetap menitikberatkan sikap *ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani*?

Maka tantangan sepuluh tahun mendatang adalah: Mewujudkan secara nyata sosok demokrasi Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sekaligus menunjang pembangunan kehidupan masyarakat yang mampu menjawab tantangan-tantangan abad ke-21.

Kesatuan dalam Keaneka-an

Masalah pusat-daerah tahun limapuluh-an dalam sepuluh tahun mendatang kiranya akan menantang lagi, itu pun dari tiga segi.

Pertama: Sejauh mana transformasi menyeluruh masyarakat Indonesia dalam proses modernisasi (yang tak terelakkan) dapat berjalan dengan tetap mempertahankan identitas budaya bangsa? Sejauh mana pembaruan dalam sistem nilai tradisional dan pembentukan sikap-sikap baru dapat berjalan tanpa menghasilkan keterasingan-

keterasingan yang mendalam? Sejauh mana modernisasi masyarakat kita sekedar bersifat meniru-niru dengan sekaligus kehilangan jiwa kita atau akan merupakan proses dialogis dan dialektis di mana masyarakat Indonesia memang menjadi baru, tetapi dalam kesetiaan kepada dirinya sendiri? Sejauh mana beberapa gejala buruk perkembangan 20 tahun terakhir seperti: mumpungisme, sloganisme, egoisme golongan, ketakpedulian sosial, sikap pamer, sikap main kuasa, korupsi, sikap marah kalau dimintai pertanggungjawaban dapat diatasi demi kembalinya keutuhan harkat etis bangsa?

Sudut kedua adalah: Sejauh mana pembangunan dapat menjamin hak hidup dan hak atas keutuhan kebudayaan dan lingkungannya serta hak akan *way-of-life*-nya sendiri setiap suku dan kelompok etnis-masyarakat? Apakah misalnya kekhasan dan keutuhan identitas sosial suku-suku Dayak atau suku-suku Irian perlu dilindas atau dapat dihormati?

Sudut ketiga bersifat lebih spesifik: Bagaimana suku dan kebudayaan Jawa (kurang-lebih 40% masyarakat Indonesia) dapat memberikan sumbangannya yang khas dan amat berharga kepada pembangunan seluruh masyarakat Indonesia --tanpa disertai Jawanisasi kehidupan bangsa? Dan tanpa dirasakan sebagai ancaman terhadap identitas golongan-golongan dan suku-suku bukan Jawa?

Untuk menyadari betapa suatu pemecahan terhadap tantangan ini, terutama yang kedua dan ketiga, perlu dicapai demi pelestarian stabilitas nasional dalam jangka panjang, cukup kalau kita melihat ke India atau Uni Soviet.

Pancasila

Bagi masa depan bangsa kita serta pembangunan tetap perlu Pancasila dijaga sebagai satu-satunya asas dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya kalau dalam negara kita semua golongan dapat *krasan* serta dihargai sebagai warga-negara yang sama hak dan kewajibannya, negara kita dapat mantap dan tangguh.

Pendasaran pada Pancasila berarti bahwa semua golongan dapat hidup menurut nilai-nilai, cita-cita, kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri, tetapi tidak memaksakannya pada golongan lain. Atau dengan kata lain: Pancasila adalah jaminan ideologis satu-satunya bahwa bangsa dan negara kita tetap mendasarkan diri pada Keindonesiannya, pada kenasionalannya, dan bukan pada harapan-harapan atau ideologi-ideologi parsial saja.

Kelestarian negara Indonesia, dan dengan demikian keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjadi bangsa yang satu itu, tetap tergantung dari kesetiaan kita semua pada konsensus yang mendasari kesepakatan semula untuk membentuk satu negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Kesetiakawanan antar Bangsa

Tentang tantangan ini saya merasa tidak perlu bicara banyak. Di bawah kepemimpinan Orde Baru Indonesia mengambil sebuah kebijakan yang di satu pihak menghindari segala pendekatan "mercusuar," di lain pihak secara efektif dan tenang mendukung perdamaian dan kemantapan di Asia Tenggara, terutama melalui ASEAN. Sementara ini saya tidak melihat sebuah tantangan yang baru dalam bidang itu. Kecuali tantangan

nomor 7 berikut.

Lingkungan Hidup

Tantangan yang 44 tahun lalu samasekali belum kelihatan, tetapi sekarang kita sadari sebagai vital, adalah tantangan lingkungan hidup. Maksudnya, kita harus dalam 10 tahun mendatang mengembangkan sebuah pola pembangunan yang sekaligus tidak merusak lingkungan hidup bangsa kita, jadi yang menjamin agar kita meninggalkan lingkungan hidup bangsa kita dalam keadaan utuh dan sehat kepada generasi yang akan datang. Kita bahkan ditantang untuk dalam pembangunan memperhatikan kepentingan seluruh umat manusia akan keutuhan dan kesehatan sistem hidup bumi kita ini, jadi kita ditantang untuk mengembangkan wawasan yang melampaui kepentingan kita sendiri.

Penutup

Saya diminta untuk membahas "Dasar-dasar Etika, Moral dan Spiritualitas Pembangunan Indonesia." Dengan bertolak dari cita-cita luhur yang mendasari pembentukan negara Republik Indonesia saya telah mencoba untuk merumuskan tujuh tantangan etis yang perlu dihadapi pembangunan Indonesia.

Adalah keyakinan saya bahwa semakin kita berusaha untuk betul-betul menjawab tantangan-tantangan itu, pembangunan yang kita jalankan akan berhasil karena berharkat etis dan manusiawi. Sekaligus fokus pada tuntutan-tuntutan itu akan mewujudkan moralitas serta spiritualitas bukan hanya para politisi, melainkan seluruh bangsa.